

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Ridhonya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 dapat tersusun. LKjIP disusun sebagai perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mempertanggungjawabkan terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026 serta dokumen Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022.

LKjIP juga merupakan salah satu dokumen evaluasi kinerja. Melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program kegiatan yang telah dicapai sehingga dalam perumusan kebijakan ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala dan permasalahan yang ada dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 ini, diharapkan semua pihak yang mendukung dan terkait mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Blitar, 15 Pebruari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR



Dra. EKA ATIKAH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD dimana dalam Perwali disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan unsur pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Blitar dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pada dasarnya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar bertujuan untuk memberikan fasilitas atau layanan terbaik dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut Sekretariat DPRD Kota Blitar telah menetapkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026, yang merupakan turunan dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, serta acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang merupakan bagian dari tahapan perencanaan lima tahunan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam upaya peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Blitar guna memberikan kontribusi dalam pencapaian **Visi** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu “ **Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat**”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kota Blitar periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan..
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.

5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Mengacu pada Misi Pemerintah Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar mengemban amanah dalam pencapaian Misi ke-5 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi".

Untuk mendukung misi ke - 5 Pemerintah Kota Blitar maka Sekretariat DPRD menentukan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yaitu " **Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD**" dengan **sasaran** :

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.
2. Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah.
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Sasaran dimaksud telah ditetapkan dalam Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD dengan target capaian kinerja (IKM = 80/baik)
2. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan target capaian kinerja (IKM = 80/baik)
3. Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah dengan target capaian kinerja (IKM = 80/baik)
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah dengan target capaian kinerja (Nilai SAKIP : A / 84)

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dimaksud pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodenisasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan 2 (dua) Program, 14 (empat belas) Kegiatan, 41 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.484.533.108 ,- (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Rupiah) dan realisasi anggaran pada akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp. **29.283.205.808,52** (Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah Lima Puluh Dua Sen) atau direalisasikan 93,01 %.

Tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Blitar diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD

Target : Nilai Indeks SKM : 80

Realisasi : Nilai Indeks SKM : 80,87

Pada Sasaran 1 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar telah tercapai, terbukti dengan Interpretasi Capaian IKU yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 80,87 atau 101,09%

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah

Indikator Kinerja : Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah

Target : Nilai Indeks SKM : 80

Realisasi : Nilai Indeks SKM : 80,76

Pada Sasaran 2 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar telah tercapai, terbukti dengan Interpretasi Capaian IKU yaitu Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 80,76 atau 100,95%

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja : Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A

Target : Baik (Nilai Sakip : 84)

Realisasi : Baik (Nilai Sakip : 85,06)

Indikator kinerja sasaran ke 3 (tiga) adalah merupakan hasil penilaian Sakip Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022, diperoleh nilai A (85,06) dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 85,06 atau 101,26%.

Gambaran dan analisa hasil capaian survey kepuasan yang disajikan dalam laporan ini, diharapkan merupakan cerminan tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar sehingga hasil survey dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Blitar kepada Anggota DPRD Kota Blitar dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Blitar serta peningkatan kinerja DPRD Kota Blitar sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingannya yang pada gilirannya diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkan DPRD bersama Pemerintah Kota Blitar.

Blitar, 15 Pebruari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR



Dra. EKA ATIKAH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

IKHTISAR EKSEKUTIF..... 2

DAFTAR ISI..... 6

BAB I PENDAHULUAN..... 7

A. Latar Belakang..... 7

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... 8

C. Maksud dan Tujuan 11

D. Dasar Hukum 11

E. Aspek-Aspek Strategis 13

F. Isu-Isu Strategis 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15

A. Rencana Strategis 2021-2026 15

B. Perjanjian Kinerja 2022..... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran..... 36

1. Analisa Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022..... 36

2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021-2022 45

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra.. 47

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM) 48

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)..... 49

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan 52

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 52

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 69

C. Prestasi/Penghargaan 70

BAB IV PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan 71

B. Langkah Perbaikan 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (Tabel 5.1 dan 6.1)

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja berdasarkan tujuan sasaran dan perjanjian yang telah ditetapkan dan permasalahan yang dihadapi setiap perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 memuat informasi tentang capaian kinerja, keberhasilan, kegagalan dan hambatan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, penyusunan LKjIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah :

1. Memberikan informasi capaian kinerja secara terukur kepada Kepala Daerah sebagai pemberi mandat.
2. Sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, dan pada tahun 2022 diubah lagi dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022, Peraturan Walikota Blitar ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai perwujudan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

2. FUNGSI

Adapun fungsi Sekretariat DPRD untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. fasilitas penyelenggaraan kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan keuangan;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

- e. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- f. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- i. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- j. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- k. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Kota Blitar, maupun website DPRD Kota Blitar;
- l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
- m. penyusunan dan penyajian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- n. Penyusunan RKA dan PRKA Sekretariat DPRD;
- o. Menyampaikan DPA/DPPA Sekretariat DPRD kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah;
- p. Menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan belanja daerah;
- q. Mengkoordinasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
- r. Menetapkan PPK Sekretariat DPRD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Sekretariat DPRD; dan
- s. Pelaksanaan fungsi kedinasaan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di Sekretariat DPRD;
- b. Perencanaan operasional Sekretariat DPRD;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan hubungan antar lembaga; dan

- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas DPRD;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

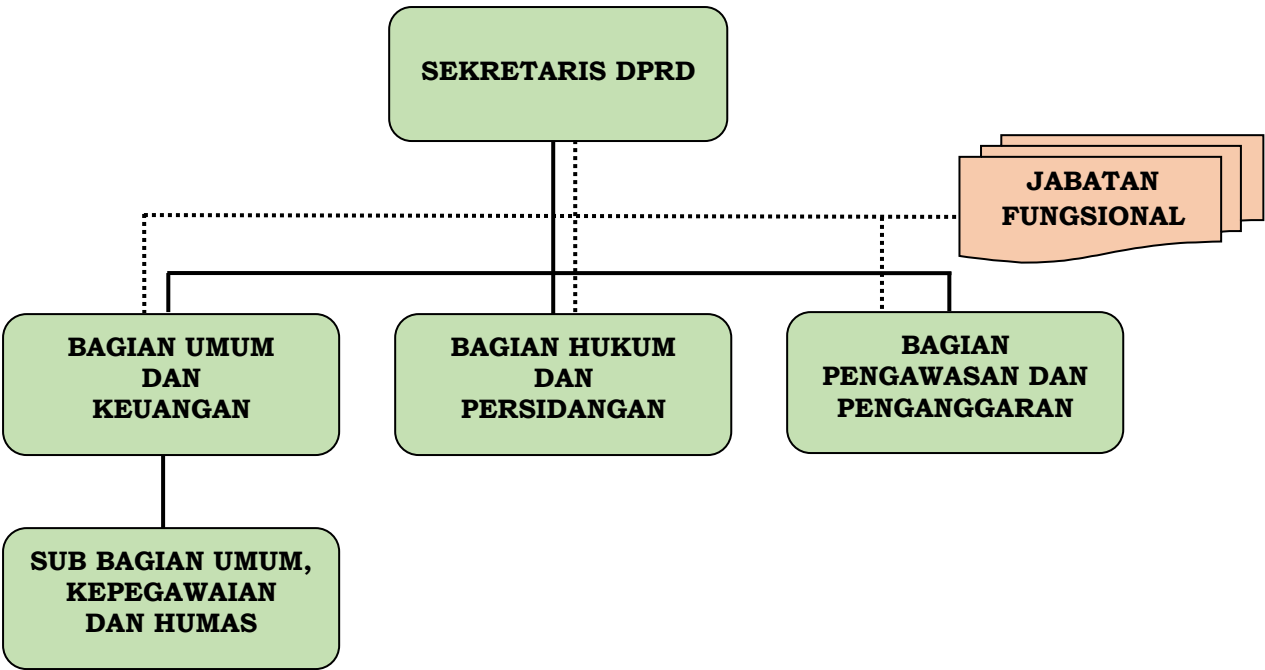
Sedangkan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Blitar (Gambar 1) dijelaskan sebagai berikut :

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD (membawahi 3 Bagian)
- b. Bagian Umum dan Keuangan membawahi :
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas;
- c. Bagian Hukum dan Persidangan
- d. Bagian Pengawasan dan Penganggaran
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar : 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR



Berdasarkan : Perwali Kota Blitar No. 56 Tahun 2022
Tanggal : 22 Juni 2022

Dari penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat DPRD Kota Blitar diatas pada intinya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi atau sebagai fasilitator seluruh kegiatan Anggota DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2022, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LKjIP) :

1. Memberikan informasi mengenai hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Tahun 2022.
2. Sebagai dasar evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Merupakan media evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 untuk mengetahui permasalahan dan hambatan serta solusi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta merencanakan upaya-upaya memperbaiki kinerja di masa datang.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek-aspek strategis yang mendukung penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar antara lain :

A. Faktor Internal :

1. Struktur Organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - Sekretaris DPRD,
 - Kepala Bagian,
 - Kepala Sub Bagian,
 - Jabatan Fungsional hasil penyetaraan yang terdiri dari : Perencana Ahli Muda, Perisalah Legislasi Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Muda, Perancang Peraturan Perundang-undangan.

2. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
3. Tersedianya tenaga alih fungsi yang cukup untuk membantu pelaksanaan tugas ASN pada Sekretariat DPRD Kota Blitar.
4. Tersedianya Tata Tertib DPRD Kota Blitar yang dituangkan dalam Peraturan DPRD Kota Blitar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD.
6. Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi berupa tersedianya layanan pendukung tugas dan fungsi DPRD dalam bentuk Aplikasi Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE) : e-RADAR sehingga mempermudah dan mempercepat pencatatan dalam notulensi rapat-rapat DPRD dan
7. Peningkatan kualitas fasilitasi dan optimalisasi fasilitasi kinerja DPRD melalui SI-KAWAN (Sistem Informasi Kinerja Dewan)

B. Faktor Eksternal :

1. Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
2. Hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD Kota Blitar, DPRD Kota Blitar dengan Pemerintah Daerah atau OPD terkait/Mitra Kerja.
3. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga dan Tim ahli sebagai Narasumber dalam rangka mendukung peningkatan kinerja DPRD.

F. ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD Belum Optimal. Dengan adanya isu strategis tersebut maka Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan tujuan pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan kinerja DPRD.

Dalam mengemban pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD senantiasa dipengaruhi oleh kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh pengembangan dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD sehingga turut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi Sekretariat DPRD serta dalam pengambilan kebijakan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar selama 5 (lima) tahun.

Didalam Visi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah **"TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT"**. Dan untuk mewujudkan Visi dimaksud Pemerintah Kota Blitar menetapkan 5 (lima) Misi. **Yaitu :**

- Misi 1 : Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3 : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4 : Meningkatkan Infrstruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Dari 5 (lima) misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Blitar dalam menunjang keberhasilan pencapaian visi Pemerintah Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai unit pendukung melaksanakan misi yang ke 5 yaitu "Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi"

Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta Target Kinerja Tujuan/Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA AWAL	KINERJA TARGET TUJUAN / SASARAN				
				2020	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan Kinerja DPRD			80	80	80,5	81	81,5	82
		Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80	80	80,5	81	81,5	82
		Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80	80	80,5	81	81,5	82
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Perangkat Minimal A Sakip Daerah	A	A (84)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan bersama antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 53 Tahun 2014.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan Sekretaris DPRD Kota Blitar untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b. Menentukan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mengacu pada Visi Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan Tujuan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2 B.1
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2022

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	84
4.	Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	Indek kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.716.569.308	APBD/DAU
B.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11.767.963.800	APBD/DAU
	TOTAL	31.484.533.108	APBD/DAU

Tabel 1.2.2
Pagu Anggaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022
Sekretariat DPRD

NO.	No.Rek	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target	PAGU Murni	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.02.0.00 .0.00.01. 0000	SEKRETARIAT DPRD			33.798.792.924	SEKRETARIAT DPRD			31.484.533.108	- 2.314.259.816
I	4.02.0.00 .0.00.01. 0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	20.923.329.224	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	19.716.569.308	- 1.206.759.916
1	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.01	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	36.635.300	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	36.635.300	-
1.1	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	17.534.900	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	17.534.900	-

1.2	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	19.100.400	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	19.100.400	-
2	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	2.866.684.755	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	2.799.634.563	- 67.050.192
2.3	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	25 org	2.866.684.755	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	25 org	2.799.634.563	- 67.050.192
3	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	106.983.800	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	106.983.800	-
3.4	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	25 stel	19.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	25 stel	19.500.000	-
3.5	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	87.483.800	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	87.483.800	-
4	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat	100%	1.868.597.200	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.948.484.500	79.887.300

			daaerah sesuai standar				sesuai standar			
4.6	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	22 jenis	56.416.700	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	22 jenis	56.416.700	-
4.7	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13 macam	455.099.900	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 macam	466.224.000	11.124.100
4.8	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	53 jenis	111.303.400	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	53 jenis	101.925.400	- 9.378.000
4.9	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	65 jenis	734.321.500	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	65 jenis	706.568.000	- 27.753.500
4.10	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia	12 cetakan	186.587.400	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia	12 cetakan	202.422.400	15.835.000
4.11	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	48 macam	20.280.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	48 macam	20.280.000	-
4.12	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1518 dos	91.830.700	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1518 dos	99.228.700	7.396.000

			Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	500 porsi			Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	500 porsi		
4.13	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	25 kali	212.757.600	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	25 kali	295.419.300	82.661.700
5	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	2.673.961.224	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	930.000.000	- 1.743.961.224 Rasionalisasi
5.14	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang terpenuhi	2 unit	725.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang terpenuhi	2 unit	930.000.000	205.000.000
5.15	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dan banagunan lainnya yang terpenuhi	1 unit	1.948.961.224	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dan banagunan lainnya yang terpenuhi	-	-	Rasionalisasi
6	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	240.651.384	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	227.771.384	- 12.880.000
6.16	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.01. 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	108 rekening	240.651.384	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	108 rekening	227.771.384	- 12.880.000

7	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	930.135.461	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	1.275.091.661	344.956.200
7.17	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.01. 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. BiayaPemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16 unit	417.790.600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. BiayaPemeliharaa n. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16 unit	498.434.600	80.644.000
			Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit			Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit		-
7.18	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.01. 2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang terpelihara	15 macam	94.829.900	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang terpelihara	15 macam	94.829.900	--
7.19	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.01. 2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	13 macam	240.875.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	13 macam	512.375.000	271.500.000

7.20	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	7 jenis	176.639.961	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	7 jenis	169.452.161	- 7.187.800
			Jumlah perlengkapan bangunan gedung kantor yang terpelihara	10 jenis			Jumlah perlengkapan bangunan gedung kantor yang terpelihara	10 jenis		-
8	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.199.680.100	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.391.968.100	192.288.000
8.21	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.15.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan	25 orang	11.811.575.100	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan	25 orang	11.979.660.600	168.085.500
8.22	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.15 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	11 macam	313.105.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	11 macam	380.807.500	67.702.500
8.23	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.01. 2.15 .03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	25 orabg	75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	25 orang	31.500.000	- 24.202.500

II	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	12.875.463.700	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	11.767.963.800	- 1.107.499.900
9	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 02.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	2.642.222.400	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	2.726.463.400	84.241.000
9.24	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 02.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah rapat penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	5 laporan	157.440.900	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah rapat penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	5 laporan	157.518.900	78.000
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dan /atau Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD	2 laporan			Jumlah fasilitasi pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dan /atau Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD	2 laporan		-
9.25	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 02.02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Raperda	10 laporan	2.229.886.500	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Raperda	10 laporan	2.314.049.500	84.163.000

9.26	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 02.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	15 jenis buku	12.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	15 jenis buku	87.000.000	75.000.000
9.27	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 02.04	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi	3 NA	225.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi	2 NA	150.000.000	- 75.000.000
9.28	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 02.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah penggandaan buku Tata Tertib / Peraturan DPRD	2 dokumen	17.895.000	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah penggandaan buku Tata Tertib / Peraturan DPRD	2 dokumen	17.895.000	--
10	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	2.048.493.100	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.522.917.500	- 525.575.600
10.29	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.02.01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 laporan	373.336.100	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 laporan	217.579.900	- 155.756.200
10.30	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.02.02	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 laporan	378.325.300	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 laporan	200.364.900	- 177.960.400
10.31	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 laporan	178.376.100	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 laporan	316.059.100	137.683.000
10.32	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.02.04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 laporan	393.499.900	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 laporan	258.377.900	- 135.122.000

10.33	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.02.05	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawab an APBD	2 laporan	724.955.700	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawab an APBD	2 laporan	530.535.700	- 194.420.000
11	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.02. 2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitas Fungsi Pengawas DPRD sesuai standar	100%	170.416.000	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitas Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	170.416.000	-
11.34	4.02.0.00 .0.00.01. 0000.02. 2.03 .07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah fasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	12 laporan	170.416.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah fasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	12 laporan	170.416.000	--
			Jumlah fasilitasi pengaduan masyarakat/unjuk rasa dan dengar pendapat/dialog/a udensi/hearing/ko nsultasi dengan pemerintah/tokoh agama/tokoh masyarakat dll	12 laporan			Jumlah fasilitasi pengaduan masyarakat/unjuk rasa dan dengar pendapat/dialog/a udensi/hearing/konsu ltasi dengan pemerintah/tokoh agama/tokoh masyarakat dll	12 laporan		
			Jumlah fasilitasi Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	12 laporan			Jumlah fasilitasi Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	12 laporan		
12	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	2.496.745.800	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	3.267.278.100	770.532.300

12.35	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.04.02	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis/Adeksi yang terfasilitasi	6 laporan	1.248.043.000	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis/Adeksi yang terfasilitasi	6 laporan	1.629.043.000	381.000.000
12.36	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.04.03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi pogram/kegiatan perangkat daerah	5 media	476.300.800	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi pogram/kegiatan perangkat daerah	5 media	917.577.100	441.277.100
12.37	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.04.04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok/tim ahli yang tersedia	7 TA	291.814.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok/tim ahli yang tersedia	7 TA	228.070.000	- 63.744.000
12.38	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.04.05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang tersedia	4 orang	222.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang tersedia	4 orang	234.000.000	21.000.000
12.39	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.04.07	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah rapat penyusunan Program Kerja DPRD yang terfasilitasi	1 dokumen	258.588.000	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah rapat penyusunan Program Kerja DPRD yang terfasilitasi	1 dokumen	258.588.000	-
13	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 02.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	75 laporan	1.211.072.700	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	75 laporan	844.131.100	- 366.941.600
13.40	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 02.05.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Fasilitasi kegiatan Reses DPRD	75 orang	1.211.072.701	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Fasilitasi kegiatan Reses DPRD	75 orang	844.131.100	- 366.941.600
			Jumlah fasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	3 kali			Jumlah fasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	3 kali		

14	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan laporan kinerja pimpinan, persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	4.306.513.700	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan laporan kinerja pimpinan, persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	3.236.757.700	- 1.069.756.000
14.41	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.08.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan Anggota DPRD	10 laporan	4.256.513.700	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan Anggota DPRD	10 laporan	3.186.757.700	- 1.069.756.000
			Jumlah fasilitasi Rapat-rapat Persiapan dan Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan yang terfasilitasi	1 laporan			Jumlah fasilitasi Rapat-rapat Persiapan dan Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan yang terfasilitasi	1 laporan		
14.42	4.02.0.0 0.0.00.01 .0000.02. 2.08.02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan DPRD yang tersusun	1 laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan DPRD yang tersusun	1 laporan	50.000.000	-

Tabel 2 B.2
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2022

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja dan anggaran	
		target	pagu
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	Indek kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	80	31.484.533.108
SASARAN 1			
Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80	9.230.499.200
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	9.230.499.200
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	2.726.463.400
Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah rapat penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	5 laporan	157.518.900
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dan /atau Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD	2 laporan	
Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Raperda	10 laporan	2.314.049.500
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	15 jenis buku	87.000.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	Jumlah penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi	2 NA	150.000.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah penggandaan buku Tata Tertib / Peraturan DPRD	2 dokumen	17.895.000

Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	3.267.278.100
Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis/Adeksi yang terfasilitasi	6 laporan	1.629.043.000
Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi pogram/kegiatan perangkat daerah	5 media	917.577.100
Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok/tim ahli yang tersedia	7 TA	228.070.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang tersedia	4 orang	234.000.000
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah rapat penyusunan Program Kerja DPRD yang terfasilitasi	1 dokumen	258.588.000
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan kaporan kinerja pimpinan, perse4ntase fasilitasi rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	3.236.757.700
Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan Anggota DPRD	10 laporan	3.186.757.700
	Jumlah fasilitasi Rapat-rapat Persiapan dan Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan yang terfasilitasi	1 laporan	
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlahdokumen laporan kinerja tahunan DPRD yang tersusun	1 laporan	50.000.000
SASARAN 2			
Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80	2.537.464.600
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	2.537.464.600

Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.522.917.500
Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 laporan	217.579.900
Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 laporan	200.364.900
Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 laporan	316.059.100
Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 laporan	258.377.900
Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 laporan	530.535.700
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	170.416.000
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah fasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	12 laporan	170.416.000
	Jumlah fasilitasi pengaduan masyarakat/unjuk rasa dan dengar pendapat/dialog/audensi/hearing /konsultasi dengan pemerintah/tokoh agama/tokoh masyarakat dll	12 laporan	
	Jumlah fasilitasi Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	12 laporan	
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	75 laporan	844.131.100
Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Fasilitasi kegiatan Reses DPRD	75 orang	844.131.100
	Jumlah fasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	3 kali	
SASARAN 3			
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah minimal A	84	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	19.716.569.308
Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	36.635.300

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	17.534.900
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	19.100.400
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	2.799.634.563
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	25 org	2.799.634.563
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	106.983.800
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	25 stel	19.500.000
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	87.483.800
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	1.948.484.500
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	22 jenis	56.416.700
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 macam	466.224.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	53 jenis	101.925.400
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	65 jenis	706.568.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	12 cetakan	202.422.400
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	48 macam	20.280.000
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1518 dos	99.228.700
	Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	500 porsi	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	25 kali	295.419.300
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	930.000.000

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang terpenuhi	2 unit	930.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dan banagunan lainya yang terpenuhi		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	227.771.384
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	108 rekening	227.771.384
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	1.275.091.661
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16 unit	498.434.600
	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang terpelihara	15 macam	94.829.900
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	13 macam	512.375.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	7 jenis	169.452.161
	Jumlah perlengkapan bangunan gedung kantor yang terpelihara	10 jenis	
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.391.968.100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan	25 orang	11.979.660.600
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	11 macam	380.807.500
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	25 orang	31.500.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar yang tertuang dalam perumusan Rencana Strategis sedangkan Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Blitar.

Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2022, berikut akan diuraikan pengukuran kinerja, akuntabilitas keuangan termasuk penghitungan efisiensi sumber daya sebagai berikut :

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Organisasi.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi, sehingga akan terlihat apakah target capaian yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum dapat dilihat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian masih perlu peningkatan pada beberapa target yang telah dicapai tahun 2022. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta pencapaian sasaran strategis.

1. Analisa Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022.

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel

2.B.1 LkjIP ini. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada akhir tahun 2022, Sekretariat DPRD Kota Blitar telah melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.A.1.1
CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama / Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian IKU/ Sasaran Strategis
	Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	Rata-rata nilai IKM fasilitas Sekretariat DPRD (IKM Fasilitas Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas)	Angka	80	80,87		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat
2.	Meningkatnya Fasilitas Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	Rata-rata nilai IKM fasilitas Sekretariat DPRD (IKM fasilitas Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	Angka	80	80,76		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat

3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	Hasil evaluasi Sakip Sekretariat DPRD	Angka	84	85,06		Nilai Sakip Sekretariat DPRD semakin meningkat
4	Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Rata-rata nilai IKM fasilitasi Sekretariat DPRD ((IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas, IKM fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	Angka	80	80,91		Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD semakin meningkat

Apabila dijelaskan dengan perhitungan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dapat dilihat pada uraian tabel dibawah ini :

Sasaran 1 : Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula si Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	Rata-rata nilai IKM fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas)	80	80,87	101,09 (tercapai)

Pada Tahun 2022 DPRD Kota Blitar menetapkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu Propemperda yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Blitar Nomor 188/20/410.040/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 beserta perubahannya yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Blitar Nomor 188/10/410.040/DPRD/2022

tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 yang direncanakan sebanyak 10 (sepuluh) Raperda yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pembentukan Dana Cadangan;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; dan
10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren;

Dari 10 (sepuluh) Propemperda Tahun 2022 yang dijadwalkan pembahasannya, sebagaimana ditetapkan Badan Permusyawaratan DPRD Kota Blitar ada 4 (empat) Raperda yang dibahas sampai dengan ditetapkan menjadi Perda, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.

Sedangkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar pada Propemperda Tahun 2022 masih menunggu hasil dari fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengarusutamaan Gender.

Dan ada Raperda yang 3 yang tidak terjadwalkan pembahasannya yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Alasan ke 2 (dua) Raperda tidak dijadwalkan pembahasan adalah karena Raperda berasal dari eksekutif dan sampai dengan akhir tahun 2022 materi Raperda belum dikirimkan ke DPRD Kota Blitar untuk dijadwalkan pembahasan oleh Bapemperda sehingga tidak dijadwalkan dalam pembahasan Raperda sedangkan 1 (satu) Raperda yaitu

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, masih dalam proses harmonisasi dengan aturan yang ada diatasnya sehingga belum bisa dijadwalkan untuk pembahasan.

Pada tahun 2022 untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja Sasaran 1, Sekretariat DPRD Kota Blitar telah melaksanakan survey kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan target Target Sasaran 1 hasil survey adalah nilai 80, sedangkan nilai hasil survey adalah 80,87. Ini menunjukan bahwa nilai hasil survey telah melebihi target yang ditentukan dengan capaian kinerja adalah 101,09. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar untuk Sasaran 1 adalah berhasil.

Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah.

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
2	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	Rata-rata nilai IKM fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	80	80,76	100,95 (tercapai)

Indikator kinerja utama pada sasaran 2 adalah untuk mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Blitar terhadap fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran dengan jalan melaksanakan SKM terhadap tugas dan fungsi pengawasan serta pembahasan kebijakan anggaran daerah. Pengawasan dilakukan melalui Kunjungan Kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kegiatan lainnya berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Sedang fungsi anggaran dengan melaksanakan pembahasan anggaran daerah..

Pada Tahun 2022 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan DPRD Kota Blitar telah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang menjadi cacatan dalam pelaksanaan pemerintahan. Rekomendasi tersebut antara lain :

1. Rekomendasi DPRD Kota Blitar, Nomor : 174/38/410.040.3/2022, tanggal 17 Januari 2022 tentang Penyampaian Hasil Hearing dengan Perkumpulan Penggemar Ayam Indonesia (PPAI) Blitar Raya
2. Rekomendasi DPRD Kota Blitar, Nomor : 174/034/410.040.3/2022, tanggal 20 Januari 2022 Rekomendasi DPRD Kota Blitar terkait Addendum Kontrak
3. Rekomendasi DPRD Kota Blitar, Nomor : 174/72/410.040.3/2022, tanggal 10 Maret 2022 tentang Penyampaian Hasil Audiensi dengan Esport Indonesia (ESI) Kota Blitar.
4. Rekomendasi DPRD Kota Blitar, Nomor : 174/78/410.040.3/2022, tanggal 18 Maret 2022 tentang Permasalahan Ketenagakerjaan dan Status Perijinan Café / Karaoke / Tempat Hiburan di Kota Blitar

Pada tahun 2022 untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja Sasaran 2, Sekretariat DPRD Kota Blitar telah melaksanakan survey kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan target Target Sasaran 2 hasil survey adalah nilai 80, sedangkan nilai hasil survey adalah 80,76. Ini menunjukkan bahwa nilai hasil survey telah melebihi target yang ditentukan dengan capaian kinerja adalah 100,95. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar untuk Sasaran 2 adalah berhasil.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	Hasil evaluasi Sakip Sekretariat DPRD	A 84 baik	A 85,06 baik	tercapai

Indikator kinerja utama dari sasaran 3 diukur dari hasil evaluasi penilaian Sakip Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2022. Pada Tahun 2022 menetapkan target nilai Sakip adalah 84, sedang hasil penilaian mencapai 85,06. Ini menunjukkan bahwa target sasaran 3 tercapai dengan nilai A=85,06 (Baik).

Sedang untuk penilaian IKU ke 4 diambil dari tujuan Sekretariat DPRD Kota Blitar, diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD.

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
4	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Rata-rata nilai IKM fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas, IKM fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	80	80,91	101,14 tercapai

Penentuan Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan Anggota DPRD Kota Blitar terhadap fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam upaya meningkatkan kinerja Anggota DPRD.

Beberapa jenis fasilitasi terhadap Anggota DPRD yang disurvei tingkat kepuasaanya antara lain :

1. Fasilitasi/layanan Ketatausahaan dan Administrasi Pengelolaan Keuangan DPRD.
2. Fasilitasi/layanan Sarana dan Prasarana.
3. Fasilitasi/layanan Penyelenggaraan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pembahasan Raperda
4. Fasilitasi/layanan Penyediaan Tenaga Ahli
5. Fasilitasi/layanan Peningkatan kapasitas DPRD
6. Fasilitasi/layanan Pelaksanaan Reses.
7. Fasilitasi / layanan Hearing/dialog dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan Pejabat Pemerintah.
8. Fasilitasi/layanan Pembahasan kebijakan Anggaran terdiri dari :
 - a. Fasilitasi/layanan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
 - b. Fasilitasi/layanan Pembahasan KUA dan PPAS.
 - c. Fasilitasi/layanan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - d. Fasilitasi/layanan Pembahasan Pembahasan APBD
 - e. Fasilitasi/layanan Pembahasan Perubahan APBD.

Pelaksanaan Survey Kepuasan terhadap Anggota DPRD Kota Blitar dilaksanakan pada bulan Nopember 2022 dengan cara membagikan kuesioner kepada 25 Anggota DPRD Kota Blitar untuk diminta pendapatnya terkait jenis fasilitasi yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Untuk menentukan hasil capaian indikator dilakukan rekapitulasi hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD.

Rekapitulasi perhitungan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.A.2.1
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2022

NO	JENIS FASILITASI	NILAI RATA-RATA PER-FASILITASI	KETERANGAN
P1	Fasilitasi/layanan ketatausahaan dan administrasi pengelolaan keuangan DPRD.	81,585	Nilai rata-rata 81,474 dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan
P2	Fasilitasi/layanan sarana dan prasarana	81,363	
P3	Fasilitasi/layanan penyelenggaraan penyusunan perundang-undangan dan pembahasan Raperda	80,626	Nilai rata-rata 80,869 dilaksanakan oleh Bagaian Hukum dan Persidangan
P4	Fasilitasi/layanan Penyediaan Tenaga Ahli	80,808	
P5	Fasilitasi/layanan Peningkatan kapasitas DPRD	81,174	
P6	Fasilitasi/layanan pelaksanaan Reses	80,586	Nilai rata-rata 80,760 dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan dan Penganggaran
P7	Fasilitasi hearing/dialog dengan tokoh masyarakat/tokoh agama dan pejabat pemerintah.	80,475	
P8	Fasilitasi/layanan pembahasan Kebijakan Anggaran		
P8.a	Fasilitasi/layanan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	81,030	
P8.b	Fasilitasi/layanan Pembahasan KUA dan PPAS	80,697	
P8.c	Fasilitasi/layanan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	80,808	
P8.d	Fasilitasi/layanan Pembahasan APBD.	80,586	
P8.e	Fasilitasi/layanan Pembahasan Perubahan APBD	81,141	
	JML TOTAL	970,879	
	NILAI IKM	80,907 (80,91 dibulatkan)	

Berdasarkan hasil penghitungan survey Indeks Kepuasan Anggota DPRD Kota Blitar terhadap pelaksanaan fasilitasi/pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar kepada 25 orang Anggota DPRD Kota Blitar, nilai IKM adalah 80,91 yang apabila dilihat dari Nilai Interval Konversi SKM nilai antara (76,61 – 88,30) adalah dalam katagori “ BAIK “. Dengan demikian capaian IKU 4 dari tujuan utama Sekretariat DPRD Kota Blitar dapat dikatakan telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu “BAIK”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022 dengan target Renstra dan Realisasi Nasional

Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesekretariatan pada Sekretariat DPRD. Hal tersebut dapat dipahami karena Sekretariat DPRD merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dan bukan merupakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 seperti dalam tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.A.2.1
Realisasi capaian Kinerja Tahun 2021
Sekretariat DPRD Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
		2021	2021
Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	100%	100 %
Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase penyampaian rekomendasi DPRD	100%	100 %
Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	90%	90%

Tabel 3.A.2.2
Realisasi capaian Kinerja Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kota Blitar

No	Sasaran /IKU	Indikator Kinerja Utama / Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Target	Realisasi	%	Interpretasi Capaian IKU/ Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	80	80,87	101,01	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitas pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat
2.	Meningkatnya Fasilitas Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	80	80,76	100,95	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah oleh Sekretariat DPRD semakin meningkat
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	84	85,06	101,26	Nilai Sakip Sekretariat DPRD semakin meningkat
4	Meningkatnya kualitas fasilitas Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitas Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	80	80,91	101,13	Indeks kualitas fasilitas Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD semakin meningkat

Keterangan :

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya perubahan atau perbedaan indikator kinerja sasaran pada Renstra yang menjadi IKU Sekretariat DPRD Kota Blitar. Dimana indikator kinerja

pada tahun 2021 diukur dari jumlah presentase fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD, sedangkan pada tahun 2022 diukur dari nilai indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD guna meningkatkan kinerja DPRD. Untuk dapat melihat lebih jelas maka realisasi capaian kinerja tahun 2021 dan realisasi capaian kinerja tahun 2022 disajikan secara terpisah yaitu Realisasi capaian kinerja tahun 2021 disajikan pada tabel 3.A.2.1, sedangkan realisasi capaian kinerja tahun 2022 disajikan pada tabel 3.A.2.2

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir Periode Renstra disajikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.A.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 s/d Akhir Periode Renstra
Sekretariat DPRD Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Thn 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda dan peningkatan kapasitas DPRD	82	80,87	98,62
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan Anggaran Daerah	82	80,76	98,49
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal A	84 (baik)	85,06	101,26
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	82	80,91	98,67

Keterangan :

Realisasi capaian Kinerja Tahun 2022 jika dibandingkan dengan realiasasi capaian kinerja akhir periode Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2021-2026,

tingkat kemajuan dapat dilihat pada tabel 3.A.3.1 yaitu sebagai berikut :

- Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD, Target kinerja : 82, realisasi pada tahun 2022 : 80,87, tingkat kemajuan perbandingan : 98,62
- Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Anggaran Daerah, Target kinerja : 82, realisasi pada tahun 2022 : 80,76, tingkat kemajuan perbandingan : 98,49
- Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, Target kinerja : 84, realisasi pada tahun 2022 : 85,06, tingkat kemajuan perbandingan : 101,26
- Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD, Target kinerja : 82, realisasi pada tahun 2022 : 80,91, tingkat kemajuan perbandingan : 98,67

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2022 belum dapat mencapai target yang diharapkan pada akhir tahun Renstra sehingga Sekretariat DPRD Kota Blitar masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target tersebut.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sedang Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah merupakan OPD pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan dalam menyelenggarakan pemerintahan sampai saat ini belum ada Standar Pelayanan Minimal terhadap publik sebab pada dasarnya Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam fungsi Anggaran, Pengawasan dan Propemperda, sehingga SPM pada Sekretariat DPRD tidak diatur dan bukan merupakan hal wajib. Untuk itu tidak ada yang dapat dibandingkan, baik SPM pada Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur, Tingkat Nasional maupun SPM pada Sekretariat DPRD diwilayah Kabupaten atau Kota terdekat. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang disahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Blitar.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME).

Selain pertanggungjawaban kinerja utama, maka perlu kiranya dilihat sejauh mana penganggaran untuk membiayai pencapaian kinerja utama tersebut. dalam melaksanakan fasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2022 melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodenisasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara rinci Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Anggaran 2022.

Jumlah pagu anggaran Belanja pada Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 secara keseluruhan Rp. **31.484.533.108,-** (Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Rupiah).

Dari total anggaran tersebut sampai pada akhir bulan Desember 2022 realisasi sebesar Rp. **29.283.205.808,52,-** (Dua Pu;uh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Lima Puluh Dua Sen).

Sedang secara tehnik operasional diuraikan dalam bentuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda.
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik.
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
4. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
 4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
 5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
5. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
6. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses

B.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui jumlah anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 disajikan data sebagai berikut :

Tabel 3.B.1
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kota Blitar

No	Sasaran	Indikator	Jml Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD.	. 9.230.499.200	29,32 %
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan anggaran daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	2.537.464.600	8,06 %
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal “A”	19.716.569.308	62,62%
JUMLAH			31.484.533.108	100%

B.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

Pengukuran pencapaian kinerja keuangan per tujuan dan / atau sasaran yang menjadi kinerja utama (cost per outcome), dihitung dengan cara sebagai berikut :

**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Blitar
Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2021
						K	Rp	K	Rp	K	A			
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD				Angka		31.484.533.108		29.283.205.808,52	80,91	101,14			Tindak ada tindak lanjut rekomendasi DPRD sebab tahun 2021 tidak ada catatan dan rekomendasi dari DPRD
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80	19.716.569.308	81,47	19.130.740.296,52	101,8	97,03	Efisiensi, Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	persen	100%	36.635.300	100%	36.034.100	100%	98,36	Efisiensi, Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7 dokumen	17.534.900	7 dokumen	17.518.400	100%	99,91	Efisiensi, Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	12 dokumen	19.100.400	12 dokumen	18.515.700	100%	96,94	Efisiensi, Anggaran direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen	100%	2.799.634.563	100%	2.727.163.435.	100%	97,41	Dibayarkan sesuai dengan gaji dan tunjangan ASN sejumlah 23 orang,		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	orang	25 orang	2.799.634.563	23 orang	2.727.163.435	100	97,41	Dibayarkan sesuai dengan gaji dan tunjangan ASN sejumlah 23 orang,		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	persen	100%	106.983.800	100%	100.914.000	100%	94,33	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	stel	25 stel	19.500.000	23 stel	17.940.000	100	97,41	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN 23 orang		
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	event	4 event	87.483.800	4 event	82.974.000	100	94,84	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen	100%	1.948.484.500	100%	1.825.942.085,52	100	93,71	Efisiensi anggaran		
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis	22 jenis	56.416.700	22 jenis	55.730.500	100	98,78	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan/tagihan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	macam	9 macam	466.224.000	9 macam	445.465.000	100	95,55	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		

			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	jenis	53 jenis	101.925.400	53 jenis	96.375.400	100	94,55	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	jenis	65 jenis	706.568.000	65 jenis	652.076.488,52	100	92,29	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	cetakan	1 cetakan	202.422.400	12 cetakan	184.280.000	100	91,04	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	macam	48 macam	20.280.000	48 macam	20.042.400	100	98,93	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	1518 dos	99.228.700	1400 dos	94.103.900	92,22	94,84	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
				Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	porsi	500 porsi		500 porsi						

			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	kali	25 kali	295.419.300	25 kali	277.868.397	100	94,06	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan kebutuhan		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	persen	100%	930.000.000	100%	906.800.000	100%	97,51	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan harga riil barang/kendaraan dinas		
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ jabatan yang terpenuhi	unit	2 unit	930.000.000	2 unit	906.800.000	100	97,51	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan harga riil barang/kendaraan dinas		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persen	100%	227.771.384	100%	161.985.157	100%	71,12	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan jumlah tagihan riil		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	rekening	108 rekening	227.771.384	108 rekening	161.985.157	100	71,12	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan jumlah tagihan riil		

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	persen	100%	1.275.091.661	100%	1.132.513.255	100%	88,82	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan jumlah tagihan riil		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	16 unit	498.434.600	16 unit	369.936.155	100	74,22	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan jumlah tagihan riil biaya pemeliharaan kendaraan operasional dinas		
				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	29 unit		29 unit						
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang terpelihara	macam	15 macam	94.829.900	15 macam	89.584.000	100	94,47	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan jumlah tagihan riil biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kantor		

			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	macam	13 macam	512.375.000	13 macam	510.078.500	100	99,55	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan jumlah kontrak dan kebutuhan biaya pemeliharaan gedung kantor		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	jenis	7 jenis	169.452.161	7 jenis	162.914.600	100	96,14	Efisiensi anggaran, direalisasi sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		
				Jumlah perlengkapan bangunan gedung kantor yang terpelihara	jenis	10 jenis		10 jenis		100				
			Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persen	100%	12.391.968.100	100%	12.239.388.264	100%	98,78	Dibayarkan sesuai dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD sejumlah 25 orang.		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan	orang	25 orang	11.979.660.600	25 orang	11.907.007.764	100	99,39	Dibayarkan sesuai dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD sejumlah 25 orang,		

			Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	macam	11 macam	380.807.500	11 macam	312.500.000	100	82,06	Efisiensi anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	orang	25 orang	31.500.000	25 orang	19.880.500	100	63,11	Efisiensi anggaran , dibayarkan sesuai dengan tagihan biaya Medical Check Up anggota DPRD		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	persen	100%	11.767.963.800	100%	10.152.465.512	100%	86,27	Anggaran bersifat penyediaan dukungan terhadap pembahasan perda dan peningkatan kapasitas		
			Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	persen	100%	2.726.463.400	100%	2.350.074.666	100%	86,19	Anggaran bersifat penyediaan untuk fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pimpinan DPRD sehingga pelaksanaan agenda dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja DPRD	

			Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah rapat penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	laporan	5 Laporan	157.518.900	5 Laporan	138.406.174	100	87,87	Menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang ditetapkan		
				Jumlah fasilitasi pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dan /atau Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD	laporan	2 laporan		1 laporan		50		PAW anggota DPRD dilaksanakan 1 kali sesuai dengan hasil Banmus		
			Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Raperda	laporan	10 laporan	2.314.049.500	10 Laporan	1.977.887.342	100	85,47	Anggaran bersifat penyediaan, Anggaran direalisasi sesuai dengan agenda pembahasan Perda yang di jadwal oleh DPRD	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pimpinan DPRD sehingga pelaksanaan agenda dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja DPRD	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Jenis buku	15 jenis buku	87.000.000	15 jenis buku	71.931.150	100	82,68	Efisiensi kebutuhan kegiatan sesuai paket		

			Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi	NA	2 NA	150.000.000	2 NA	144.000.000	100	96	Efisiensi anggaran dibelanjakan sesuai kebutuhan paket kegiatan		
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah penggandaan buku Tata Tertib / Peraturan DPRD	dokumen	2 dokumen	17.895.000	2 dokumen	17.850.000	100	99,75	Efisiensi, anggaran dibelanjakan sesuai kebutuhan paket kegiatan		
			Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar	persen	100%	1.522.917.500	100%	1.330.654.538	100%	87,38	Efisiensi anggaran		
			Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	laporan	2 laporan	217.579.900	2 laporan	202.072.905	100	92,87	Efisiensi anggaran		
			Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	laporan	2 laporan	200.364.900	2 laporan	181.702.554	100	90,69	Efisiensi anggaran		
			Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	laporan	2 laporan	316.059.100	2 laporan	234.465.497	100	74,18	Anggaran bersifat penyediaan, Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal hasil Banmus		

			Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan		2 laporan	258.377.900	2 laporan	193.974.753	100	75,07	Anggaran bersifat penyediaan, Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal hasil Banmus		
			Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungj awaban APBD	laporan	4 laporan	530.535.700	4 laporan	518.438.829	100	97,72	Anggaran bersifat penyediaan, Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal hasil Banmus		
			Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	persen	100%	170.416.000	100%	107.471.000	100%	63,06	Anggaran bersifat penyediaan, Anggaran direalisasi sesuai dengan agenda rapat- rapat,dialog/hearing /monitoring dan evaaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang di jadwal oleh DPRD		

			Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah fasilitas monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	laporan	12 laporan	170.416.000	12 laporan	107.471.000	100	63,06	Anggaran bersifat penyediaan, Anggaran direalisasi sesuai dengan agenda rapat-rapat, dialog/hearing /monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang di jadwal oleh DPRD		
				Jumlah fasilitas pengaduan masyarakat/ unjuk rasa dan dengar pendapat/dialog/audensi/hearing/konsultasi dengan pemerintah/tokoh agama/tokoh masyarakat dll	laporan	12 laporan		12 laporan		100				
				Jumlah fasilitas Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	laporan	12 laporan		12 laporan		100				

			Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	persen	100%	3.267.278.100	100%	2.638.123.428	100%	80,74			
			Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis/ Adeksi yang terfasilitasi	laporan	6 laporan	1.629.043.000	5 laporan	1.216.809.283	83,33	74,69	Anggaran ini merupakan anggaran penyediaan untuk kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan anggota DPRD. Sesuai dengan ketentuan Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan Bimbingan Teknis sebanyak 6x dalam 1 tahun anggaran. Akan tetapi dari 6x kegiatan Bimbingan Teknis yang direncanakan, baru terealisasi sebanyak 5x sebab tidak cukup waktu sebab akibat intensitas kegiatan anggota DPRD yang sangat tinggi kegiatan sehingga terdapat sisa anggaran.		

				Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	orang	25 orang		25 orang		100				
			Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi pogram/kegiatan perangkat daerah	media	5 media	917.577.100	5 media	876.260.750	100	95,50	- Anggaran penyediaan kegiatan telah dilaksanakan untuk memfasilitasi publikasi seluruh kegiatan DPRD dan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD - Efisiensi anggaran		
			Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok/tim ahli yang tersedia	TA	7 Tim Ahli	228.070.000	7 Tim Ahli	119.205.900	100	52,27	Anggaran ini merupakan anggaran penyediaan untuk belanja jasa Narasumber/Tenaga Ahli untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau pembahasan APBD. Dari anggaran yang disediakan seluruh pembahasan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan.		

			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang tersedia	orang	4 orang	234.000.000	4 orang	228.000.000	100	97,44	Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan standart harga besaran honorarium Tenaga Ahli Fraksi selama satu tahun anggaran.		
			Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah rapat penyusunan Program Kerja DPRD yang terfasilitasi	dokumen	1 dokumen	258.588.000	1 dokumen	197.847.495	100	76,51	Efisiensi anggaran dan pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan kegiatan yang telah ditentukan.		
			Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	laporan	75 laporan	844.131.100	75 laporan	599.599.000	100	71,03	Tidak terserap maksimal dikarenakan pelaksanaan reses dilaksanakan dengan sistem paket secara door to door di masa pandemi Covid-19		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pelaksanaan Resesnya	orang	75 orang	844.131.100	75 orang	599.599.000	100	71,03	Tidak terserap maksimal dikarenakan pelaksanaan reses dilaksanakan dengan sistem paket secara door to door di masa pandemi Covid-19		

				Jumlah fasilitas penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	kali	3 kali		3 kali		100				
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan kaporan kinerja pimpinan, perse4ntase fasilitas rapat-rapat DPRD sesuai standar	persen	100%	3.236.757.700	100%	3.126.542.880	100%	96,60			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan Anggota DPRD	laporan	10 laporan	3.186.757.700	10 laporan	3.076.925.880	100	96,55	Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan DPRD telah sesuai dengan jadwal dan kegiatan yang telah ditentukan		

				Jumlah fasilitas Rapat-rapat Persiapan dan Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan yang terfasilitasi	laporan	1 laporan		1 Laporan		100				
			Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan DPRD yang tersusun	laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	49.617.000	100	99,24	Tersusun 1 dokumen Laporan Kinerja DPRD sesuai dengan jadwal.		

Dari aspek keuangan, kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam rangka memfasilitasi Anggota DPRD Kota Blitar dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat dikategorikan **berhasil**. Hal ini dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 31.484.533.108,- dengan realisasi Rp. 29.283.205.808,82 atau 93,01% dan dari aspek capaian kinerja dengan nilai IKM dengan target 80, dan realisasi hasil IKM tahun 2022 sebesar 80,91.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.B.3.1
Persentase Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kota Blitar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2022		Persentase (%)	Tahun 2022			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi		Anggaran	Penyerapan Anggaran & %	Sisa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD.	80	80,87	101,09	9.230.499.200	8.114.740.974, (87,91%)	1.115.758.2261	1,15
Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80	80,76	100,95	2.537.464.600	2.037.724.538 (80,31%)	499.740.062	1,26
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah "A" .	84	85,06	101,26	19.716.569.308	19.130.740.296,52 (97,03%,)	585.812.511	1,04

Formulasi Tingkat Efisiensi : % Kinerja : % Penyerapan Anggaran

C. PRESTASI / PENGHARGAAN

Penghargaan yang pernah diterima Sekretariat DPRD Kota Blitar selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	PENGHARGAAN	TINGKAT	DIBERIKAN OLEH
1.	Nilai SAKIP “A”	Tingkat Kota Blitar	Walikota Blitar
2.	Juara II Lomba Legal Drafting Award “Meningkatkan Produk Hukum Daerah Kota Blitar Keren”	Tingkat Kota	Walikota Blitar

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 wujud pertanggung jawaban tertulis penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretariat DPRD Kota Blitar memuat keberhasilan, kegagalan, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2022 dan merupakan amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari seluruh data yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan masuk dalam kategori berhasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Blitar adalah fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD menetapkan 1 tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretaris DPRD dengan Walikota Blitar atas Nama Pemerintah Daerah Kota Blitar yaitu sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD.

Capaian kinerja pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam dukungan Fungsi Pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD tercapai 100% dengan nilai indeks kepuasan Anggota DPRD : 80,87 sedang target indeks kepuasan anggota DPRD adalah 80 sehingga masuk dalam kategori berhasil dan baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran daerah dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah.

Capaian kinerja pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan dan penganggaran daerah tercapai 100% dengan nilai indeks kepuasan Anggota DPRD : 80,76 sedang target indeks kepuasan Anggota DPRD adalah 80 sehingga masuk dalam kategori berhasil dan baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah “A” dengan target nilai 84, pada Tahun 2022 nilai Sakip Sekretariat DPRD adalah “A” = 85,06. Nilai telah melebihi target.

Sedang tujuan dan indikator tujuan dalam Renstra Sekretariat DPRD tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD dengan target 80, dan capaian Indeks IKM Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah 80,91 dalam Nilai Interval Konversi Survey Kepuasan Masyarakat termasuk kategori “Baik”. Dengan demikian target capaian kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2022 telah tercapai dan melebihi target yang ditetapkan.

Sejalan dengan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran, capaian realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2022 termasuk dalam katagori berhasil dengan tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar 93,01%.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dari evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan program, kegiatan, Sub Kegiatan dan kebijakan selama Tahun Anggaran 2022 maka disampaikan saran perbaikan sebagai solusi permasalahan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong seluruh Alat Kelengkapan DPRD Kota Blitar untuk menyusun Rencana Kerja DPRD sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD dan konsisten dalam pelaksanaannya.
- b. Memberikan saran dan masukan kepada Pimpinan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Blitar agar seluruh Propemperda yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD sedapat mungkin dapat dibahas seluruhnya atau sekurang-kurangnya 80% dari jumlah propemperda.

- c. Meningkatkan kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan mengikutsertakan pada kegiatan Workshop, Bimtek atau Capacity Building guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme ASN Sekretariat DPRD Kota Blitar.
- d. Menciptakan inovasi baru untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam fasilitasi guna peningkatan kinerja DPRD.
- e. Selalu meningkatkan komunikasi internal dan eksternal antara Sekretariat DPRD dengan DPRD dan Instansi terkait sebagai Mitra Kerja.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Anggota DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.
- g. Menjalin dan meningkatkan komunikasi internal yang baik dengan Anggota DPRD Kota Blitar sehingga tercipta hubungan harmonis antara DPRD dengan Sekretariat DPRD guna mengatasi masalah yang sering muncul dalam penetapan kebijakan internal dan juga menjalin komunikasi eksternal yang baik pula antara Sekretariat DPRD dengan Instansi terkait

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 ini disusun untuk dapat memberikan informasi dan menggambarkan tingkat capaian kinerja dari seluruh pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Blitar

Blitar, 15 Pebruari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR


Dra EKA ATIKAH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680812 198803 2 006

LAMPIRAN : I

MATRIK RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2022-2026

VISI : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat
MISIS : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2022				2020	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	rata – rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD, IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	100%	80	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD)	80	80	Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD dalam fungsinya sebagai Pembentuk Peraturan Daerah dan meningkatkan kapasitas DPRD	Optimalisasi Fasilitasi bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD dalam fungsi pembentuk Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan menetapkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dituangkan dalam kegiatan : 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. 2. Peningkatan Kapasitas DPRD 3. Fasilitasi Tugas DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	

					Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	80	80	Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran daerah	Optimalisasi Fasilitasi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran daerah dengan menetapkan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dituangkan dalam kegiatan : 1. Pembahasan Kebijakan AnggaranF 2. Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan. 3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
					Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah minimal A	Hasil evaluasi Sakip Sekretariat DPRD			Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Blitar	Peningkatan kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Blitar melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme ASN.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	

PEMERINTAH KOTA BLITAR
SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR
 SEKRETARIAT DPRD
Dra. EKA ATIKAH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196808121988032006

LAMPIRAN : II
 RENCANA KINERJA TAHUN 2022
 SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80	Program Dukungan Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	9.230.499.200	Kegiatan Pembentuka n Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	2.726.463.400	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah rapat penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	5 Laporan	157.518.900
												Jumlah fasilitasi pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dan /atau Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD	2 laporan	
											Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Raperda	10 laporan	2.314.049.500
											Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	15 jenis buku	87.000.000

											Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah penyusunan Naskah Akademik yang terfasilitasi	2 NA	150.000.000
											Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah penggandaan buku Tata Tertib / Peraturan DPRD	2 dokumen	17.895.000
							Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	3.267.278.100	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis/Adeksi yang terfasilitasi	6 laporan	1.629.043.000
												Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	25 orang	
											Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi pogram/kegiatan perangkat daerah	5 media	917.577.100
											Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok/tim ahli yang tersedia	7 Tim Ahli	228.070.000
							Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang tersedia	4 orang	234.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah rapat penyusunan Program Kerja DPRD yang terfasilitasi	1 dokumen	258.588.000

							Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	Persentase fasilitas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan Laporan kinerja pimpinan, perse4ntase fasilitas rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	3.236.757.700	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan Anggota DPRD	10 Laporan	3.186.757.700
												Jumlah fasilitas Rapat-rapat Persiapan dan Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan yang terfasilitasi	1 laporan	
											Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan DPRD yang tersusun	1 laporan	
2.Meningkatnya Fasilitas fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	2.537.464.600	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.522.917.500	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 laporan	217.579.900
											Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	2 laporan	200.364.900

											Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 laporan	316.059.100
											Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 laporan	258.377.900
											Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	4 laporan	530.535.700
							Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	170.416.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah fasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	12 laporan	170.416.000
												Jumlah fasilitasi pengaduan masyarakat/unjuk rasa dan dengar pendapat/dialog/audiensi/hearing/konsultasi dengan pemerintah/tokoh agama/tokoh masyarakat dll	12 laporan	
												Jumlah fasilitasi Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	12 laporan	

							Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	75 orang	844.131.100	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pelaksanaan Resesnya	75 orang	844.131.100
												Jumlah fasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	3 kali	
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah minimal A	84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	19.716.569.308	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	36.635.300	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	17.534.900
											Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	19.100.400
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	2.799.634.563	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	25 orang	2.799.634.563
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	106.983.800	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	25 stel	19.500.000
											Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	87.483.800

							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	1.948.484.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	22 jenis	56.416.700
											Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 macam	466.224.000
											Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	53 jenis	101.925.400
											Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	65 jenis	706.568.000
											Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	1 cetakan	202.422.400
											Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	48 macam	20.280.000
											Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1518 dos	99.228.700
												Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	500 porsi	

											Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	25 kali	295.419.300
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	930.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang terpenuhi	2 unit	930.000.000
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	227.771.384	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	108 rekening	227.771.384
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	1.275.091.661	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16 unit	498.434.600
												Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	
											Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang terpelihara	15 macam	94.829.900

											Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	13 macam	512.375.000
											Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	7 jenis	169.452.161
												Jumlah perlengkapan bangunan gedung kantor yang terpelihara	10 jenis	
							Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.391.968.100	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan	25 orang	11.979.660.600
											Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	11 macam	380.807.500
											Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	25 orang	31.500.000

PEMERINTAH KOTA BLITAR
 SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR
 SEKRETARIAT DPRD
 Dr. EKA ATIKAH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660812 198803 2 006
 BLITAR

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. EKA ATIKAH**
Jabatan : **Sekretaris DPRD Kota Blitar**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan penacapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 18 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
PIL. WALIKOTA BLITAR

Drs. SANTOSO, M.Pd.

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR

Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	80
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (84)
4.	Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	Indeks Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.716.569.308,-	APBD
B.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11.767.963.800,-	APBD
	TOTAL	31.484.533.108,-	APBD

Blitar, 18 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR

PIHAK KEDUA,
PL. WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd.

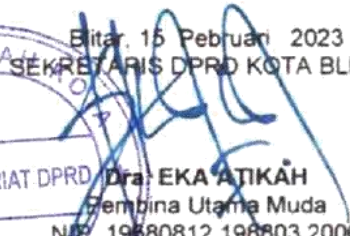


Dra. EKA ATIKAH

Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

LAMPIRAN IV
PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI	%	KET
1	SASARAN 1 Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD.	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD)	80	80,87	101,09	Pelaksanaan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD dilaksanakan sesuai agenda yang dijadwalkan oleh DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.230.499.200	8.114.740.974	87,91	Efisiensi anggaran
2	SASARAN 2 Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan anggaran daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)	80	80,76	100,95	Pelaksanaan fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran dilaksanakan sesuai agenda yang dijadwalkan oleh DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2.537.464.600	2.037.724.538	80,31	Efisiensi anggaran
3	Sasaran 3 Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Minimal "A"	Hasil evaluasi Sakip Sekretariat DPRD	84	85,06	106,33	Sudah dilaksanakan survey kepuasan terhadap 25 anggota DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	19.716.569.308	19.130.740.296,52	97,03	Efisiensi anggaran

Blitar, 15 Februari 2023
SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR

Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 196803 2006

